

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen merupakan kata yang berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yakni, “*Management*” dengan imbuhan kata adjektif *to manage* dapat diartikan secara garis besar yakni “mengurusi atau kompetensi untuk menjalankan atau mengontrol suatu urusan dalam istilah asing lainnya ialah “*act of running and controlling a business*”. Merujuk pendapat Terry & Rue, manajemen secara bahasa adalah pengelolaan atau pengaturan, sedangkan menurut istilah yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan orang lain untuk melaksanakan demi mencapai suatu tujuan¹

Kurikulum berasal dari bahasa latin, yaitu “*Curriculae*” artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.² Pengertiannya dalam dunia pendidikan : suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat didalamnya. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³

Oemar Hamalik juga memberikan pendapatnya mengenai kurikulum. Menurutnya, pengertian kurikulum dapat dibagi menjadi dua, yakni kurikulum menurut pandangan lama dan menurut pandangan baru. Dalam pandangan lama (pandangan tradisional), kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk mendapatkan surat tanda tamat belajar. Sedangkan pada pandangan baru, kurikulum memiliki sifat yang luas karena kurikulum tidak diartikan sebagai kumpulan beberapa mata pelajaran, tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian dari kurikulum⁴

¹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1

² Oemar Hamalik. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005, 16.

³ Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012, 3.

⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 3-4

Bersumber dari definisi di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kurikulum ialah dokumen baik secara langsung dituliskan maupun tak ditulis, yang isinya aktivitas pendidikan yang butuh dilakukan secara langsung. Kurikulum berjalan dinamis disusun merujuk tuntutan zaman serta kebutuhan warga negara. Kurikulum mengandung sebuah falsafah, materi, teknis dan penilaiannya yang dipakai sebagai rujukan pihak sekolah setiap penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dibuat berdasarkan kebutuhan warga negara dan dinamika serta tuntutan zaman

Manajemen kurikulum adalah sebagai sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, aktif, sistemik dan sistematis. Manajemen sangat diperlukan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki arah tujuan dan konsep manajemen yang baik. Rohiyat berpendapat, manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola⁵. Pengelolaan dilakukan berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, melalui proses dan dikelola secara sistematis. Sementara itu, Engkoswara dan Aan Komariah berpendapat, manajemen merupakan suatu proses yang berkelanjutan bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien⁶. Selanjutnya Jejen Musfah, berpendapat bahwa manajemen terkait tiga hal pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Manajemen kurikulum termasuk dalam sebuah kegiatan rencana, pelaksanaan serta sebuah evaluasi guna bertujuan supaya semua kegiatan belajar-mengajar berlangsung dengan baik dan target kurikulum tercapai.⁷ Lebih lanjut bahwa manajemen kurikulum selalu menyoal pengelompokan dari sumber yang ada di institusi pendidikan khususnya sekolah.⁸

. Proses manajemen dalam kurikulum sangatlah penting agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dan secara tepat dapat mencapai sarasannya. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif,

⁵ Rohiyat, *Manajemen Sekolah*, Bandung: Refika Aditama, 2012

⁶ Aan, Komariah dan Engkoswara. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012

⁷ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

⁸ Rohiyat, *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama, 2012

komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.⁹ Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau madrasah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau madrasah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan .

Berdasarkan di atas, manajemen kurikulum adalah suatu proses yang melibatkan orang lain, untuk mengelola perangkat pada suatu lembaga pendidikan, demi mencapai tujuan yang baik dan dilaksanakan secara terus menerus. Manajemen kurikulum tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

B. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup dari manajemen kurikulum ini ialah perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang secara umum banyak digunakan di berbagai situasi dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan secara rinci terhadap ruang lingkup manajemen kurikulum sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

1) Perencanaan Kurikulum

Maksud manajemen dalam perencanaan kurikulum ialah keahlian mengelola dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional.

Hamalik menyatakan bahwa dalam perencanaan kurikulum hal pertama yang dikemukakan ialah berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum yang banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.¹⁰

Terdapat dua pendekatan pendekatan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pendekatan yang bersifat “administrative approach” dan pendekatan yang bersifat “grass roots approach”.¹¹ Pendekatan yang bersifat “administrative approach” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada

⁹ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3

¹⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 149

¹¹ *Ibid.*, 150.

instansiinstansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi from the top down, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam hal ini tidak banyak yang dapat dilakukan oleh bawahan dalam melakukan perencanaan kurikulum, karena atasanlah yang memiliki kuasa penuh dalam melakukan perencanaan tersebut. Pendekatan yang bersifat “grass roots approach” yaitu, dimulai dari bawah. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan kurikulum yang melibatkan bawahan bahkan pada tingkat guru-guru untuk dapat bersama-sama memikirkan ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.¹² Perencanaan kurikulum menyangkut penetapan tujuan dan memperkirakan cara pencapaian tujuan tersebut.¹³ Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.¹⁴ Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan.

Menurut Hamalik, pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi bagi keberhasilan kurikulum, sebagai berikut:

a) Perencanaan kurikulum

Berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber yang diperlukan peserta, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.

b) Perencanaan kurikulum

¹² Rusman, *Op.Cit.*, 21

¹³ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 96.

¹⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 171.

Berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang baik berpengaruh dalam membuat keputusan.

c) Perencanaan kurikulum

Berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.¹⁵

Kepala sekolah sebagai manajer dalam pengembangan kurikulum berperan dalam memberikan perhatian, pembinaan dan bantuan serta memeriksa pekerjaan guru. Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memberikan penilaian dan umpan balik apabila ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Dengan cara ini akan memberikan pengaruh dan dampak bagi guru untuk melakukan persiapan dan perencanaan pembelajaran dengan baik.¹⁶

Semua kegiatan manajemen harus didasarkan pada perencanaan yang matang dengan mengukur kemampuan, situasi, dan kondisi. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam perencanaan kurikulum setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi kegiatan pokok, yaitu, perumusan tujuan, perumusan isi, merancang strategi pembelajaran, merancang strategi penilaian. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi dimulai dari yang umum sampai tujuan khusus. Hal ini diklasifikasikan menjadi 4 tujuan, yaitu:

a) Tujuan pendidikan nasional,

Tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan.

b) Tujuan institusional,

Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan atau kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan program pada lembaga tertentu.

c) Tujuan kurikuler

¹⁵ *Ibid.*, 152

¹⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 197.

Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran.

d) Tujuan pembelajaran,

Didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekali pertemuan.¹⁷

Selanjutnya isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan.¹⁸ Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.

Selanjutnya terdapat strategi pembelajaran atau biasa disebut dengan metode pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.¹⁹ Secara operasional strategi pembelajaran adalah prosedur dan metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari lima variabel yakni tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode dan teknik mengajar siswa, guru, dan unsur penunjang. Strategi pembelajaran digunakan dalam setiap aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai.²⁰

Komponen yang terakhir adalah merancang strategi penilaian atau evaluasi. Sistem penilaian merupakan bagian integral dalam suatu kurikulum yang bertujuan untuk

¹⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, 194.

¹⁸ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 161.

¹⁹ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan*, 178

²⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, 196.

mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kurikulum.²¹ Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan.

2) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Rusman memberikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (scope) dan urutan bahan pelajaran, kontinuitas kurikulum yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, keseimbangan bahan pelajaran, dan alokasi waktu yang dibutuhkan.²²

Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yakni: (1) Ruang lingkup (Scope); Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. (2) Urutanbahan (Sequence); Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan meliputi dua hal yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. (3) Kontinuitas; Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. (4) Keseimbangan; Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar. (5) Integrasi atau keterpaduan; Yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang

²¹ Oemar Hamalik, 161

²² Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 60-61.

diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya, setelah siswa menyelesaikan program pendidikan disekolah.²³

Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk bentuk organisasi, sebagai berikut:

- a) Kurikulum mata pelajaran, yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah.
- b) Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan mata ajaran sejenis.
- c) Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu.
- d) Core curriculum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.²⁴

Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala madrasah. Kepala madrasah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan madrasah.²⁵

3) Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶

Implementasi kurikulum mencakup tiga tahapan pokok yaitu:

1) Pengembangan program

Mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.

2) Pelaksanaan pembelajaran

Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

3) Evaluasi

Proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan

²³ Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), 111.

²⁴ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 137

²⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 197

²⁶ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, 97.

secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Karakteristik kurikulum,
Mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya.
- b. Strategi implementasi,
Strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
- c. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran.²⁷

Kepala sekolah dalam tahap ini bersama-sama guru membuka diri terhadap masukan atau kritik yang membangun yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum. Sebagai guru harus siap untuk diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Begitu pun kepala sekolah harus memiliki jadwal yang jelas dan rinci untuk melakukan supervisi terhadap kinerja guru, hasil supervisi kepala sekolah menjadi fakta dan data yang benar untuk memberikan informasi kepada guru berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya selama di sekolah.

4) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁸

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk perbaikan program, bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, diperlukan semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut baik yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah

²⁷ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 175.

²⁸ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, 199.

dikembangkan. Tujuan ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam melainkan lebih merupakan suatu 'keharusan' dari luar. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan, tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan: pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebar luaskan ke dalam sistem yang ada. Kedua, dalam kondisi yg bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan diperlukan kegiatan evaluasi kurikulum.

Kepala sekolah berperan penting dalam kegiatan evaluasi kegiatan. Pengembangan kurikulum yang telah direncanakan, dikoordinasikan dilaksanakan dan telah melalui pengawasan kepala sekolah sendiri lan sehingga kepala sekolah mampu melakukan evaluasi yang dibantu oleh para staf. Cocok kah pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan, kemudian mencari tahu hambatan dan pendorong terlaksananya pengembangan kurikulum. Sehingga kepala sekolah beserta bawahannya bekerja sama untuk melakukan perbaikan pengembangan kurikulum di tahun berikutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang telah dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan atau keberhasilan pendidikan yang telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihakpihak diluar pendidikan.

C. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Guna mengimplementasikan sebuah manajemen kurikulum yang bagus, maka dibutuhkan untuk perhatian pada setiap prinsip-prinsip manajemen kurikulum, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Berfokus pada aspek visi, misi dserta tujuan Pendidikan

Perihal Manajemen kurikulum wajib menjalankan rancangan kurikulum guna mengarah pada visi, misi dan tujuan Pendidikan yang sudah direncanakan.

- b. Produktivitas

Manajemen kurikulum wajib memiliki orientasi disetiap hasil yang maksimal pada implementasi kurikulum.

- c. Demokratis

Manajemen kurikulum haruslah memiliki orientasi disetiap kepentingan serta memenuhi kebutuhan setiap peserta didik tanpa adanya tindakan yang diskriminatif.

D. Manajemen Kurikulum di Sekolah Dasar

“Secara formal dan istitusional sekolah dasar termasuk dalam katagori pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang dilandasi jenjang menengah. Pendidikan dasar membentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.”²⁹

Pendidikan dasar yang dimaksudkandalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu berbentuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Dengan kata lain yang dimaksud pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut adalah pendidikan wajib 9 tahun. Adapun pendidikan dasar yang dimaksud penulis adalah pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun.

Sekolah dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar. Sekolah dasar tidak ubahnya sebagai sebuah lembaga. Sebagai sebuah lembaga mengemban misi tertentu, yaitu melakukan proses edukasi proses sosialisasi dan proses informasi peserta didik dalam rangka mengantarkan mereka ke jenjang selanjutnya. Sekolah dasar tidak semata-mata membekali anak didiknya berupa kemampuan belajar membaca menulis dan berhitung akan tetapi harus mengembangkan potensi pada siswa baik potensi mental sosial dan spiritual”³⁰. Selanjutnya karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar adalah berfokus pada hal-hal yang nyata atau konkrit pembelajaran usia sekolah dasar memerlukan pemikiran yang rasional praktik langsung agar siswa dapat merasakan pengalamannya sendiri dalam pembelajaran yang dilaksanakannya. Menciptakan pengalaman yang banyak kepada siswa tingkat dasar akan tertanam dalam aktivitas mentalnya pada kejadian yang pernah dialaminya sehingga penanaman nilai dan pembelajaran di desain untuk menciptakan pengalaman yang menarik berkesan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter peserta didik.

“Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan a) peningkatan iman dan takwa, b) peningkatan akhlak mulia, c)peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, e) tuntutan pembangunan daerah dan

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

³⁰ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016

nasional g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, h) agama, i) dinamika perkembangan global, k) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu kurikulum pendidikan dasar wajib memuat: a) pendidikan agama, b) pendidikan kewarganegaraan, c) bahasa, d) matematika, e) ilmu pengetahuan alam, f) ilmu pengetahuan sosial, g) seni dan budaya, h) pendidikan jasmani dan olah raga, i) keterampilan, j) muatan lokal. Ruang lingkup manajemen kurikulum di sekolah dasar terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan standar kelulusan dan standar isi, pelaksanaan berkaitan dengan standar proses, dan evaluasi berkaitan dengan standar penilaian.³¹”

E. Konsep Pendidikan Karakter

1. Pengertian pendidikan Karakter

Karakter ialah "watak, sifat, atau hal-hal yang begitu mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak pada diri seseorang. Adapun sebutan karakter adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap fikiran dan perbuatannya. Banyak yang memandang dan mengartikannya identik dengan kepribadian.³²

Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan dan sikap Moralitas dan kebenaran yang telah terbentuk merupakan perwujudan dari perbuatan baik yang mendatangkan segala dalam diri seseorang untuk menegakkan suatu keadilan yang berperadaban. Kebenaran, kebaikan, dan kekuatan sikap yang ditunjukkan terhadap lingkungan adalah bagian dari integral yang menyatu dengan karakter.³³

Karakter bersangkutan dengan moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan individu.³⁴

Pendidikan karakter ialah pemberian tuntunan pada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang karakter dapan dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, Pendidikan karakter dapat pula dimaknai sebagai upaya terencana untuk

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³² Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*, Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2013

³³ Yamin, Mohammad, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: Diva Press, 2012

³⁴ Ardi Novan Wiyani, *Manajemen Kelas*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. dapat dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga Penanaman nilai pada warga sekolah maknanya bahwa pendidikan karakter baru pendidikan di sekolah, semua harus terlibat dalam pendidikan karakter³⁵.

Berdasar paparan dari para ahli di atas maka dapat peneliti tarik sebuah kesimpulan yakni, pendidikan karakter ialah sebuah usaha secara sadar terencana yang diusahakan oleh suatu instansi Pendidikan guna menghasilkan manusia dengan memiliki karakter yaitu siswa terbangun atas moralitas telah tertanam pada diri serta tercermin disetiap perilakunya. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus, perilaku itu telah mandarah daging dipakai pada setiap bagian kehidupan masyarakat, di sekolah, rumah, lingkungan sosial serta sebagai warga negara. Pendidikan karakter tersebut diberikan dan kemudian dibentuk oleh lingkungan melewati kebiasaan secara berkelanjutan dibarengi dengan selarasnya nilai, etika dan moral yang terbentuk dengan kerja sama yang baik seluruh elemen masyarakat mulai dari Pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintahan.

2. Urgensi Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan di kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa “emas” namun “krisis” bagi pembentukan karakter seseorang.³⁶

Sepuluh tanda zaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran.³⁷ 10 zaman itu adalah:

- a. Meningkatnya kerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar
- b. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kasar dan tidak baku
- c. Pertemanan yang tidak sehat, membentuk kelompok dan memilih-milih teman

³⁵ Samani, Ridwan Abdullah dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

³⁶ Gunawan, Heri, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2014

³⁷ Lickona, Thomas, *Educating for Character*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

- d. Pergaulan bebas, seks bebas, pengaruh obat-obatan terlarang, alcohol dan perilaku merusak diri
- e. Ketidak jelasan perilaku baik dan buruk, karena kuburusan sudah sering terjadi dianggap hal yang wajar dan biasa saja
- f. Menurunnya etos kerja antar anggota masyarakat.
- g. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru.
- h. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok.
- i. Maraknya kebohongan dan ketidak jujuran.
- j. Rasa curiga, buruk sangka kepada sesama

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia, kini sangat gencar mensosialisasikan pendidikan karakter, bahkan pendidikan kementerian Nasional sudah mencanangkan penerapan (implementasi) pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Mhammad Nuh bahwa pendidikan karakter perlu dilanjutkan sejak usia dini, jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang.³⁸

Namun bagi sebagian keluarga, barang kali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut *digugu lan ditiru*, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung ombak di kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik.³⁹

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Sudah tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan karakter sudah sangat mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. Alasan-alasan kemerosotan moral yang terjadi tidak hanya dalam diri generasi muda, akan tetapi sudah menjadi ciri khas abad kita, seharusnya membuat kita mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga pendidikan

³⁸ Gunawan, Heri, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2014

³⁹ Kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

mampu menyumbangkan perannya bagi perbaiki kultur yang membuat peradaban kita semakin manusiawi.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Tujuan Pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan di atas dirinya sendiri, secara natural manusia memiliki kemampuan melibihi dengan makhluk lainnya. Kemampuan manusia dapat dimaksimalkan baik secara kecerdasan emosional, spiritual dan kemampuannya menciptakan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kesemua hal itu harus dipadukan secara selaras agar tercipta lingkungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai penjaga ekosistem di bumi.⁴⁰

Dengan menempatkan pendidikan karakter dalam kerangka dinamika dan dialektika proses pembentukan individu, para insan pendidikan seperti, guru, orang tua, staf sekolah dan masyarakat, diharapkan semakin dapat menyadari pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk pedoman perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menyediakan ruang bagi figure keteladanan bagi anak-anak peserta didik dan menciptakan sebuah lingkungan yang produktif bagi proses pertumbuhan berupa, kenyamanan, keamanan, yang membantu siswa mengembangkan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya teknis, intelektual, psikologis, moral, social estesis, dan religius).⁴¹

4. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Terdapat dua nilai dalam kehidupan ini yaitu nilai moral dan non moral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan adalah hal-hal yang dituntut dalam kehidupan ini. Kita akan merasa tertuntut untuk menempati janji, membayar

⁴⁰ Koesoema, Doni, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010

⁴¹ Koesoema, Doni, . *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2015

berbagai tagihan hutang, memberi pengasuhan kepada anak-anak, dan bergaul adil dalam bergaul dimasyarakat. Nilai-nilai moral meminta kita untuk melaksanakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita harus melakukannya sekalipun kita tidak ingin melakukannya. Nilai-nilai non moral tidak membawa tuntutan-tuntutan seperti di atas. Nilai tersebut lebih menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan ataupun yang kita sukai⁴².

Nilai-nilai moral yang menjadi tuntutan dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu universal dan non universal. Nilai-nilai moral universal seperti memperlakukan orang lain dengan baik, serta menghormati pilihan hidup, kemerdekaan dan kesetaraan dapat menyatukan semua orang dimanapun mereka berada karena kita tentunya menjunjung tinggi dasar-dasar nilai kemanusiaan dan penghargaan diri. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut agar kita semua dapat berlaku sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku secara universal. Sebaliknya, nilai-nilai moral yang bersifat non universal tidak membawa tuntutan moral yang bersifat universal. Ini adalah nilai-nilai seperti kewajiban yang berlaku pada agama-agama tertentu (ketaatan, berpuasa, dan memperingati hari besar keagamaan) yang secara individu menjadi tuntutan yang cukup penting, namun hal tersebut belum tentu dirasakan sama dengan individu lain⁴³

Nilai pendidikan budaya dan kerakter bangsa berasal dari nilai-nilai luhur universal, yakni:

- a. Cinta Tuhan dan ciptaannya.
- b. Kemandirian dan bertanggung jawab
- c. Kejujuran/amanah dan diplomatis
- d. Hormat dan santun
- e. Hormat dan santun
- f. Hormat dan santun
- g. Kepemimpinan dan keadilan
- h. Baik dan rendah hati

⁴² Lickona, Thomas, *Educating for Character*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

⁴³ Lickona, Thomas, *Educating for Character*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

i. Toleransi, kedamaian dan kesatuan⁴⁴

Menurut pendidikan Nasional, terdapat 18 nilai karakter bangsa:

1) Religius

Yakni sebuah sikap serta perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah lain, dan hidup rukun dengan pemeluk ibadah lain.

2) Jujur

Yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

3) Toleransi.

Yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4) Disiplin

Yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5) Kerja keras

Yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menghadapi dalam berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6) Kreatif

Yaitu berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7) Mandiri

Yaitu sikap perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8) Demokratis

Yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9) Rasa ingin tahu

Yaitu rasa dan sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.

⁴⁴ Salahudin, Anas dan Irwanto Alkrienciehie, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*. Bandung: Pustaka Setia, 2013

10) Semangat kebangsaan

Yaitu cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan diri dan kelompoknya

11) Cinta tanah air

Yaitu cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi dan politik bangsa.

12) Menghargai prestasi

Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13) Bersahabat/komunikatif

Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang bicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.

14) Cinta damai.

Yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15) Gemar membaca

Yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya.

16) Peduli lingkungan.

Yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17) Peduli sosial.

Yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18) Tanggung jawab.

Yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, social, budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵

5. Implementasi Pendidikan Karakter

⁴⁵ Yaumin, Muhammad, Pendidikan Karakter (Landasan, Pilar dan Implementasi), Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi dan pendekatan yang meliputi:

- a. Pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran.
- b. Pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran.
- c. Pembiasaan dan latihan. Dengan komitmen dan dukungan berbagai pihak, institusi sekolah dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan positif seperti salam, senyum dan sapa (3S) setiap hari saat anak datang dan pulang sekolah.
- d. Pemberian contoh atau teladan.
- e. Penciptaan suasana berkarakter di sekolah.
- f. Pembudayaan. Pembudayaan adalah tujuan institusional suatu lembaga yang ingin mengimplemantasikan pendidikan karakter di sekolah. Tanpa adanya pembudayaan, nilai dan etika yang diajarkan hanya menjadi pengetahuan kognitif semata. Perlu upaya, komitmen, dan dukungan semua komponen untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter berbasis nilai dan etika tersebut.⁴⁶

Pendidikan tidak berjalan dengan sendirinya, melainkann sebuah nilai yang bersatu kesatuan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Proses pendidikan karakter tidak dapat langsung dilihat hasilnya dalam waktu singkat, tetapi memerlukan proses yang kontinu dan konsisten. Pendidikan karakter berkaitan dengan waaktu yang panjang sehingga tidak dapat dilakukan dengan hanya satu kegiatan saja. Disinilah pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kehidupan sekolah, baik dalam konteks pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.

⁴⁶ Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012